



POLICY BRIEF

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN BOGOR TERHADAP PELAKSANAAN HAJI TAHUN 2021 MASA PANDEMI COVID 19

Mahmudi Affan Rangkuti¹

Ringkasan Eksekutif

Memenuhi peran dan fungsi dari analisis kebijakan secara umum menyangkut kebijakan yang mendukung Visi Kementerian Agama melalui PMA Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenag 2020-2024 ditetapkan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong" dan mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat. Visi Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yaitu profesional, andal, saleh, moderat, cerdas dan unggul. Visi ini menyangkut seluruh unit kerja di Kementerian Agama termasuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Berbicara haji memang sangat kompleks baik pada aspek manajemen, manasik, non manasik karena menyangkut jemaah haji yang harus dibina, dilayani dan dilindungi menuju kemandirian

dan ketahanan jemaah itu sendiri sesuai mandat UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Melibatkan banyak lembaga, kementerian dan instansi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah. Sedangkan dalam latar belakang jemaah juga sangat beragam tidak akan sama keinginan dalam pelayanan. Pastinya keinginan jemaah dapat dikatakan semua ingin menunaikan jemaah haji dimana masa tunggu yang semakin tahun semakin lama.

Masa tunggu ini menjadi semakin lama ketika penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2020 dibatalkan karena wabah Covid 19 yang melanda di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Walaupun pada awalnya kebijakan pembatalan ini melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020 M mendapat reaksi negatif akan tetapi dapat diterima atas nama keselamatan. Psikologis jemaah dalam penyelenggaraan Tahun 2021 mendapat angin segar ketika vaksin Covid 19 tiba di Tanah Air dan sudah mulai diberikan mulai pada 13 Januari 2021 walaupun tetap harus melakukan protocol Kesehatan dalam menjalankan aktivitas keseharian.

Peluang inilah menjadikan jemaah haji bersemangat untuk dapat melakukan perjalanan ibadah

¹ Analisis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Bina Haji
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama RI.
Email : affanrangkuti@gmail.com

haji dengan ditetapkannya tiga skenario penyelenggaraan oleh Kementerian Agama. Skenario yang mana yang akan dijalankan tergantung kepada penetapan kuota dari Pemerintah Arab Saudi serta perkembangan wabah terkini. Mengukur persepsi tentu dibutuhkan dalam rangka sebagai bahan memberikan masukan kebijakan haji mendatang melalui survei pemetaan persepsi masyarakat dan ditentukan pilihan survei selama 15 hari secara online adalah Kabupaten Bogor sebagai kuota waitinglist tertinggi saat ini. Ternyata hasil

dari survei online tersebut, masyarakat Kabupaten Bogor lebih memilih dan sangat berharap pemerintah dapat memberangkatkan jemaah dengan kuota normal. Menyadari bahayanya Covid 19 masyarakat juga menyetujui apabila pemerintah menerapkan skenario pemberangkatan dengan skema kuota sebesar 50 persen. Pilihan batal kembali lebih cenderung ditolak.

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan aktivitas yang berlangsung terus menerus setiap tahun. Melibatkan banyak uang, banyak orang, banyak pihak, keberagaman strata sosial, tempat pelaksanaan di negeri orang, dan dilaksanakan pada satu waktu tertentu. Ini menjadi sumber persoalan yang seringkali membuat Kementerian Agama selalu dipandang negatif dalam setiap penyelenggaraan. Walaupun pada kenyataannya layanan penyelenggaraan haji setiap tahun meningkat berdasarkan hasil survei indeks kepuasan jemaah. Wajar, pandangan negatif tersebut muncul karena penyelenggaraan haji identik dengan soal ibadah, hingga sesuatu yang kurang akan disandingkan dengan kata ibadah. Ini yang membuat penyelenggaraan selalu menjadi buah bibir dalam setiap penyelenggaraannya, termasuk pembatalan keberangkatan jemaah haji Tahun 2020 disebabkan Covid 19 yang berdampak kepada pro dan kontra di masyarakat.

Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M akhirnya dapat diterima setelah dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Hal ini dalam rangka menjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan dan di Arab Saudi karena ancaman Covid 19 yang melanda hampir di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Penerimaan masyarakat atas keputusan dimaksud tentu mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2021 di tengah Covid 19 masih melanda. Menyikapi hal ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama disaat Pemerintah Arab Saudi sampai kini juga belum memberikan informasi resmi

terkait penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021. Sementara, waktu terus berjalan sehingga Kemenag harus menyiapkan mitigasi berbagai kemungkinan skema penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021M. Berbagai potensi masalah dipetakan dan disiapkan skema mitigasinya.

Peta masalah yang disiapkan Kemenag mencakup banyak aspek. Antara lain terkait tiga skema penyelenggaraan ibadah haji, kuota normal, pembatasan kuota, dan pembatalan keberangkatan dan dampak yang ditimbulkannya. Dampak tersebut terutama terkait layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan juga kesehatan. Termasuk juga kemungkinan dampak pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih.¹

Terkait itu, penulis melakukan survei *online*. Suatu metode penelitian secara *online* melalui media *google* formulir untuk mengumpulkan informasi dan persepsi dari responden dengan menggunakan kuesioner untuk dijawab dengan nama Survei *Online* Pelaksanaan Haji Tahun 2021 di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Tanggal 5 - 19 Januari 2021 Tentang Pemetaan Pelaksanaan Haji Tahun 2021. Kuisisioner *online* dimaksud disebarkan ke *group* media sosial masyarakat Kabupaten Bogor.

II. Identifikasi Masalah

Perkembangan harian penanganan Covid 19 di Indonesia per 16 Januari 2021, kembali mencatatkan kesembuhan harian tertinggi yakni mencapai 7.491 orang dan meningkatkan

¹ Kemenag dan Komisi VIII Bahas Mitigasi Penyelenggaraan Haji 2021, <https://haji.kemenag.go.id/v4/kemenag-dan-komisi-viii-bahas-mitigasi-penyelenggaraan-haji-2021>, diakses 19 Januari 2020, jam 09.56 WIB.

jumlah kesembuhan kumulatif menjadi 718.696 orang atau persentasenya di angka 81,4%. Pada penambahan pasien terkonfirmasi positif harian, hari ini bertambah sebanyak 12.818 kasus. Jumlah kumulatifnya, atau pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga saat ini, mencapai 882.418 kasus. Sementara jumlah negatif Covid 19 dari hasil periksa laboratorium, per hari ini sebanyak 36.648 orang dan kumulatifnya 4.593.282 orang.²

Sedangkan di Arab Saudi berdasarkan data per 17 Januari 2021 Arab Saudi total kasus sebanyak 364.613 dan kasus baru selama 14 hari dari tanggal 2 hingga 15 Januari 2021 sebanyak 1.735.³ Total kasus di dunia berdasarkan data per 17 Januari 2021 sebanyak 94.410.568 kasus.⁴

Perkembangan data kasus ini menjadi satu hal yang penting dalam menentukan satu kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2021. Bahkan hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum dapat memastikan berapa jumlah kuta haji bagi negara pengirim jemaah haji termasuk Indonesia. Indonesia melalui Kementerian Agama melakukan langkah menetapkan tiga skema penyelenggaraan ibadah haji yaitu kuota normal, pembatasan kuota, dan pembatalan keberangkatan dan dampak yang ditimbulkannya.

Tiga skema yang ditetapkan dimaksud tentunya memerlukan pendapat langsung dari masyarakat sebagai gambaran pemetaan persespi. Kaitan hal tersebut maka penulis melakukan survei online berkaitan dengan persepsi itu dengan menentukan Kabupaten Bogor sebagai daerah yang memiliki kuota terbesar kabupaten kota di Indonesia yang jumlahnya sebesar 3.421.⁵

Mengacu kepada latar belakang masalah yang telah

² Pasien Sembuh Semakin Bertambah Menjadi 718.696 Orang, <https://covid19.go.id/berita/pasien-sembuh-semakin-bertambah-menjadi-718696-orang>, Kemenag dan Komisi VIII Bahas Mitigasi Penyelenggaraan Haji 2021, <https://haji.kemenag.go.id/v4/kemenag-dan-komisi-viii-bahas-mitigasi-penyelenggaraan-haji-2021>, diakses 17 Januari 2020, jam 10.00 WIB.

³ Virus Corona (Covid-19), <https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F01z215&gl=ID&ceid=ID%3Aid>, diakses 17 Januari 2021, jam 14.00 WIB.

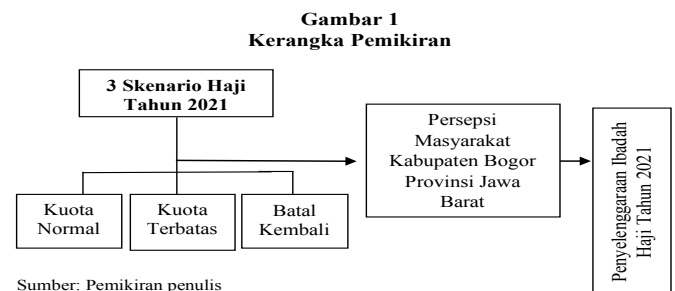
⁴ Ibid.

⁵ Waiting List, <https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list>, diakses 19 Januari 2021, jam 14.40 WIB.

dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Bogor terhadap skema penyelenggaraan ibadah haji kuota normal?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Bogor terhadap skema penyelenggaraan ibadah haji pembatasan kuota?
3. Bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Bogor terhadap skema penyelenggaraan ibadah haji pembatalan keberangkatan?
4. Bagaimana harapan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap skema penyelenggaraan ibadah haji 2021?

Kerangka pemikiran dari masalah yang ada serta pemecahannya dapat digambarkan sebagai berikut:



III. Tanggapan Umum

Sebanyak 451 responden asal Kabupaten Bogor yang mengisi Formulir Kuisisioner Survei *Online* Pelaksanaan Haji Tahun 2021 Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Tanggal 5 sampai dengan 19 Januari 2021 melalui *google* formulir <https://bit.ly/3nfxVA> dengan rincian data responden sebagai berikut:

1. Pekerjaan

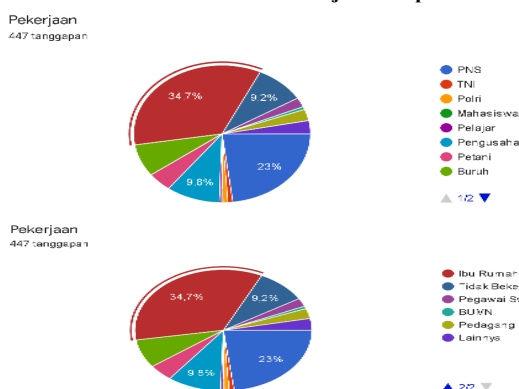
Sebanyak 447 orang memberikan jawaban tentang pekerjaan dengan persentase:

- PNS 103 responden (23%)
- TNI 4 responden (0.9%)

- Polri 4 responden (0.9%)
- Mahasiswa 1 responden (0.2%)
- Pelajar 2 responden (0.4%)
- Pengusaha 44 responden (9.8%)
- Petani 20 responden (4.5%)
- Buruh 34 responden (7.6%)
- Ibu Rumah Tangga 155 responden (34.7%)
- Tidak Ibu Rumah Tangga 155 responden (34.7%)
- Bekerja 41 responden (9.2%)
- Pegawai Swasta 10 responden (2.2%)
- BUMN 3 responden (0.7%)
- Pedagang 12 responden (2.7%)
- Lainnya 14 responden (3.1%)

Persentase responden atas pekerjaan lebih besar pada jenis pekerjaan Ibu Rumah Tangga 155 responden (34.7%), PNS 103 responden (23%), Pengusaha 44 responden (9.8%) dan Tidak Bekerja 41 responden (9.2%).

Gambar 2
Jenis Pekerjaan Responden



Sumber: Data diolah

2. Usia

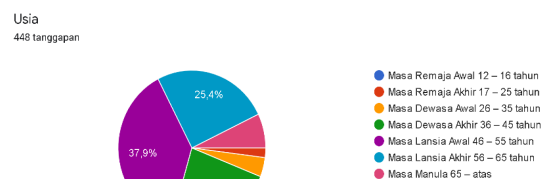
Sebanyak 448 orang memberikan jawaban tentang usia dengan persentase:

- Masa Remaja Awal 12 - 16 tahun responden 0 (0%)

- Masa Remaja Akhir 17 - 25 tahun responden 9 (2%)
- Masa Dewasa Awal 26 - 35 tahun 18 responden (4%)
- Masa Dewasa Akhir 36 - 45 tahun responden 105 (23.4%)
- Masa Lansia Awal 46 - 55 tahun 170 responden (37.9%)
- Masa Lansia Akhir 56 - 65 tahun 114 responden (25.4%)
- Masa Manula 65 - atas responden 32 (7.1%)

Persentase responden tentang usia lebih besar pada Masa Lansia Awal 46 - 55 tahun 170 responden (37.9%), Masa Lansia Akhir 56 - 65 tahun 114 responden (25.4%) dan Masa Dewasa Akhir 36 - 45 tahun responden 105 (23.4%).

Gambar 3
Usia Responden

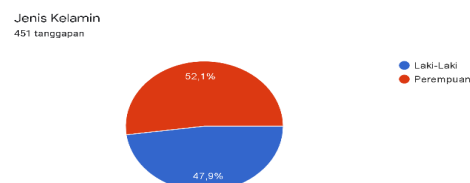


Sumber: Data diolah

3. Jenis Kelamin

Sebanyak 451 orang memberikan jawaban tentang jenis kelamin dengan persentase perempuan sebanyak 235 responden (52.1%) dan laki-laki 216 (47.9%).

Gambar 4
Jenis Kelamin Responden

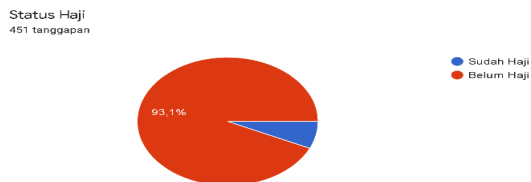


Sumber: Data diolah

4. Status Haji

Sebanyak 451 orang memberikan jawaban tentang jenis kelamin dengan persentase belum haji sebanyak 420 responden (93.1%) dan sudah haji 31 responden (6.9%).

Gambar 5
Status Haji Responden

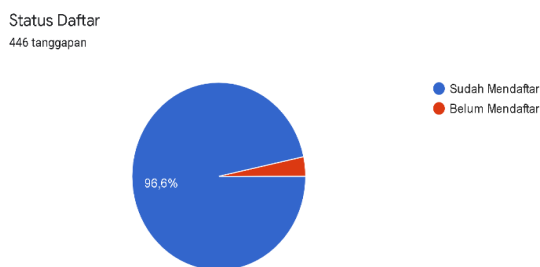


Sumber: Data diolah

5. Status Daftar

Sebanyak 446 orang memberikan jawaban tentang status daftar haji dengan persentase sudah mendaftar sebanyak 431 responden (96.6%) dan belum mendaftar 15 responden (3.4%).

Gambar 6
Status Daftar Haji Responden



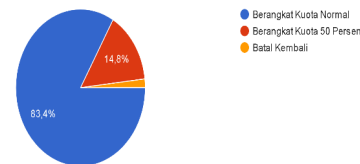
Sumber: Data diolah

Adapun tentang persepsi masyarakat Kabupaten Bogor tentang skema pelaksanaan dalam menjamin keselamatan jemaah haji dan pemerintah menetapkan tiga skenario haji 2021 yang ditanggapi sebanyak 445 responden yang hasilnya adalah:

- Sebanyak 371 responden (83.4%) menginginkan berangkat dengan kuota normal
- Sebanyak 66 responden (14.8%) menginginkan berangkat dengan kuota 50 persesen
- Sebanyak 8 responden (1.8%) menginginkan batal kembali seperti Tahun 2020

Gambar 7
Tanggapan Responden Tentang 3 Skenario Haji

Dalam Menjamin Keselamatan Jemaah Haji Pemerintah Menetapkan 3 Skenario Haji 2021 Masa Pandemi Covid-19 Yaitu Berangkat Kuota Normal, Kuota 50 Persen dan Batal Kembali, Pilihan Anda:
445 tanggapan



Sumber: Data diolah

IV. Persepsi Terhadap Skema Pemberangkatan

Adapun terkait dengan persepsi masyarakat Kabupaten Bogor tentang tiga skema sebagai skenario yang akan ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, diperoleh sebagai berikut:

1. Persepsi Terhadap Kuota Normal

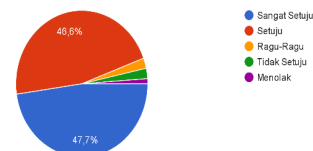
Sebanyak 440 responden menjawab apabila berangkat kuota normal dan dipastikan akan diterapkan protokol kesehatan sangat ketat:

- 210 responden (47.7%) sangat setuju
- 205 responden (46.6%) setuju
- 10 responden (2.3%) ragu-ragu
- 10 responden (2.3%) tidak setuju
- 5 responden (1.1%) menolak

Dapat disimpulkan sebanyak 415 responden (94.3%) setuju apabila pemerintah menetapkan kuota normal dengan protokol kesehatan sangat ketat, sedangkan sisanya menolak dan ragu-ragu dalam menjawab.

Gambar 8
Tanggapan Responden Tentang Kuota Normal

Apabila Berangkat Kuota Normal Dipastikan Akan Diterapkan Protokol Kesehatan Sangat Ketat, Pendapat Anda?
440 tanggapan



Sumber: Data diolah

2. Persepsi Terhadap Kuota 50 Persen

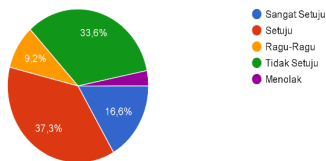
Sebanyak 434 responden menjawab apabila berangkat kuota 50 persen dan pemerintah pemerintah menentukan umur berangkat dalam rangka melindungi jemaah:

- 72 responden (16.6%) sangat setuju
- 162 responden (37.3%) setuju
- 40 responden (9.2%) ragu-ragu
- 146 responden (33.6%) tidak setuju
- 14 responden (3.2%) menolak

Dapat disimpulkan sebanyak 234 responden (53.9%) sangat setuju dan setuju dengan skema kouta 50 persen. Adapun yang tidak setuju dan menolak sebanyak 160 responden (36.9%), sedangkan sisanya ragu-ragu. Ada kecenderungan responden menerima pemberangkatan kuota normal dengan penentuan umur.

Gambar 9
Tanggapan Responden Tentang Kuota 50 Persen

Apabila Berangkat Kuota 50 Persen Bagaimana Jika Pemerintah Menentukan Umur Berangkat Dalam Rangka Melindungi Jemaah, Pendapat Anda?
434 tanggapan



Sumber: Data diolah

3. Persepsi Terhadap Batal Kembali

Sebanyak 434 responden menjawab apabila penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2021 batal kembali sebagaimana Tahun 2020 dalam rangka melindungi jemaah:

- 27 responden (6.2%) sangat setuju
- 98 responden (22.6%) setuju
- 35 responden (8.1%) ragu-ragu
- 240 responden (55.3%) tidak setuju
- 34 responden (7.8%) menolak

Dapat disimpulkan sebanyak 125 responden (28.8%) sangat setuju dan setuju dengan skema batal kembali. Adapun yang tidak setuju dan menolak sebanyak 274 responden (63.1%), sedangkan sisanya ragu-ragu. Ada kecenderungan responden tak menginginkan pemberangkatan jemaah haji Tahun 2021 batal kembali.

Gambar 10
Tanggapan Responden Tentang Batal Kembali



Sumber: Data diolah

V. Kesimpulan Persepsi

Pemetaan persepsi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi berdasarkan hasil survei secara *online* dimaksud dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Responden sangat berharap pemerintah dapat memberangkatkan jemaah dengan kuota normal.
2. Responden juga sangat menyadari bahayanya Covid-19 dan menyetujui apabila pemerintah menerapkan skenario pemberangkatan dengan skema kuota sebesar 50 persen.
3. Besarnya harapan responden terhadap penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2021 maka responden lebih cenderung menolak apabila penyelenggaraan dibatalkan kembali seperti Tahun 2020

Adapun usulan lain dari responden atas kuisisioner pada pertanyaan saran, responden mengharapkan pemerintah dapat menyejukkan pada aspek pembiayaan yang diasumsikan akan mengalami kenaikan.

VI. Rekomendasi Kebijakan

Mengacu kepada hasil persepsi tersebut sebagai pemetaan untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi saat ini pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama melakukan

mitigasi yang lebih masif, terstruktur dan sistematis dengan melakukan:

1. Pendekatan psikologis dan sosial antara pelayan publik dengan masyarakat untuk terbangunnya komunikasi yang lebih menyentuh dengan cara melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) secara langsung tentang penyelenggaraan ibadah haji secara virtual berbasis media sosial maupun berbasis media mainstream seperti talkshow dan sejenisnya sekurangnya satu minggu sekali;
2. Melibatkan stakeholder baik ditingkat pusat dan daerah dalam membangun kedekatan psikologis dan sosial dimaksud sehingga masyarakat merasakan pelayan publik hadir dan sangat memperhatikan harapan masyarakat dengan membentuk Gugus Tugas KIE di pusat dan daerah;
3. Pelaksanaan KIE ini diyakini akan mampu menekan tingkat gejolak sosial dan politik yang berpeluang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji mengingat banyaknya peristiwa kerumunan dan lainnya yang bisa dijadikan bahan perbandingan dalam melakukan kritisi dan bisa mendorong perubahan pandangan yang semula secara umum menerima pelaksanaan tiga skenario tersebut menjadi menolak.

Referensi

1. *Survei Online Pelaksanaan Haji Tahun 2021 Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Tanggal 5 sampai dengan 19 Januari 2021;*

2. *Website Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah <https://haji.kemenag.go.id/v4/>;*
3. *Website Satuan Tugas Penanganan COVID-19 <https://covid19.go.id/>;*
4. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);*
5. *Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020 M;*
6. *Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenag 2020-2024;*
7. *Focus Group Discussion (FGD) Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI Tanggal 10 Desember 2021 di Hotel di Jakarta Barat.*

Lampiran

Hasil isian formulir dan pengolahan data secara online Survei Online Pelaksanaan Haji Tahun 2021 Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Tanggal 5 sampai dengan 19 Januari 2021. Link <https://bit.ly/3nfxvVA>.